



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189
Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos.sel :
dpmtk.singkawangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

NOMOR : B/000.8.6.3/ 60 /SET.02 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BERDASARKAN POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA
KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/384/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, hasil evaluasi AKIP Kota Singkawang mengalami penurunan pada komponen perencanaan kinerja;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor B/000.8.6.3/59/SET.02 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Pohon Kinerja (POKIN) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, telah disusun perubahan lampiran rencana strategis berdasarkan pohon kinerja dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tentang Penetapan Perubahan Lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) Berdasarkan Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 03 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga
Kerja Kota Singkawang,



Yasmalizar, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004

**LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BERDASARKAN POHON KINERJA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
 TAHUN 2023-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE 2026						
				KODE	URAIAN				Tahun Ke-1 (Tahun 2023)		Tahun Ke-2 (Tahun 2024)		Tahun Ke-3 (Tahun 2025)		Tahun Ke-4 (Tahun 2026)								
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																							
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.	Meningkatnya Peluang Dan Kesempatan Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja																			
					2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	91,37%	91,50%	124.890.000	91,65%	155.027.432	91,80%	290.051.911	92,00%	192.203.681	92,00%	762.173.024
					2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen	0	1	25.000.000	1	30.000.000	1	150.000.000	0	37.000.000	3	
					2	07	02	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	0	0	0	0	0	1	115.000.000	0	0	1	
					2	07	02	2.01	0003	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen RTK Mikro Yang Disusun	Dokumen	0	1	25.000.000								
					2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang				5	30.000.000	10	35.000.000	15	37.000.000	30	
					2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Pada Pasar Kerja	Persen	60,42%	61,46%	24.890.000	62,50%	25.027.432	63,54%	25.051.911	64,58%	25.203.681	64,58%	
					2	07	04	2.01		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	1	2	5.000.000	1	5.027.432	1	5.051.911	4	4.703.681	9	

2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja	Informasi	0	1	13.890.000	1	13.900.000	1	13.900.000	1	14.500.000	4
					Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	Orang	0	0	0	0	0	0	400	0	400	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	0	2	13.890.000	5	13.900.000	8	13.900.000	10	14.500.000	25
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	21	22	6.000.000	23	6.100.000	24	6.100.000	25	1.000.000	115
					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	20	1.000.000	20	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Dengan Tata Kelola Kerja Yang Layak	Persen	0,00%	11,00%	75.000.000	12,00%	100.000.000	13,00%	115.000.000	14,00%	130.000.000	14,00%
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama Yang Disahkan	Persen	100,00%	100,00%	38.000.000	100,00%	31.000.000	100,00%	34.000.000	100,00%	37.000.000	100,00%
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teraftar di WLKP	Peraturan	75	0	0	96	12.000.000	105	13.000.000	114	14.000.000	390
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja	Perusahaan	6	0	0	8	5.000.000	9	6.000.000	10	7.000.000	33
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta	Laporan	1	1	38.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	5
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100,00%	100,00%	37.000.000	100,00%	69.000.000	100,00%	81.000.000	100,00%	93.000.000	100%
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1	4	9.000.000	3	10.000.000	3	11.000.000	2	12.000.000	13
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	1	2	12.000.000	2	12.500.000	2	14.000.000	2	14.500.000	9
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi/ Serikat Pekerja	0	0	0	1 dan 10	15.000.000	1 dan 10	15.500.000	1 dan 10	18.000.000	3 dan 30
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	0	1	16.000.000	1	16.500.000	1	16.100.000	1	18.000.000	4
2	07	05	2.02	005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	0	0	0	60	15.000.000	135	24.400.000	140	30.500.000	335

Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi i Nasional																			
										Persen	26,09%	60,00%	115.000.000	65,00%	190.099.842	70,00%	190.285.777	75,00%	191.438.573	75,00%	686.824.192		
					2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Bersertifikasi Pelatihan	Persen	100,00%	100,00%	115.000.000	100,00%	190.099.842	100,00%	190.285.777	100,00%	191.438.573	100,00%		
					2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Unit Kompetensi Yang Dilaksanakannya	Unit/ Kejuruan	3	2	115.000.000	2	175.099.842	2	175.285.777	2	176.200.000	11	
					2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	48	14	110.000.000	32	170.000.000	32	170.185.777	32	171.000.000	158	
					2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lembaga	0	1	5.000.000	1	5.099.842	1	5.100.000	1	5.200.000	4	
					2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	Persen	0,00%	0,00%	0	20,00%	15.000.000	24,00%	15.000.000	28,00%	15.238.573	72,00%	
					2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	0	0	0	5	15.000.000	6	15.000.000	7	15.238.573	18	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi (milyar rupiah)																				
		1. Meningkatkan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi							Persen	6,76%	6,80%	633.206.309	7%	656.823.948	8%	670.261.026	9%	768.559.912	9%	2.728.851.195
				2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim PM	Persen	n/a	29%	231.600.000	43%	135.000.000	57%	140.000.000	100%	227.849.000	100,00%	
							Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kebijakan	0	1	100.000.000	0	0	1	140.000.000	1	20.000.000	3		
							Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0	1	100.000.000	0	0	1	140.000.000	0	0	2		
							Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan	Kegiatan Usaha	0	0	0	0	0	0	2	20.000.000	2			
		2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat	Dokumen	3	1	131.600.000	1	135.000.000	0	0	2	207.849.000	7		
		2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dokumen	3	1	131.600.000	1	135.000.000	0	0	1	104.849.000	6		
							Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	103.000.000	1			
		2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Persen	100%	100%	5.217.562	100%	5.235.283	100%	5.238.447	100%	5.258.066	100%		
		2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan	Kali	1	1	5.217.562	1	5.235.283	1	5.238.447	1	5.258.066	5		
							Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	1	5.217.562	0	0	0	0	0	0	1		
		2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kali	2	0	0	1	5.235.283	1	5.238.447	1	5.258.066	5		

				2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Persen	21,00%	22,37%	390.363.747	23,00%	507.513.665	24,00%	512.897.579	25,00%	520.277.846	25,00%	
				2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	79	85	390.363.747	90	507.513.665	95	512.897.579	100	520.277.846	449	
				2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	Kegiatan Usaha	0	0	0	8	115.000.000	10	120.000.000	12	125.000.000	0	
				2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	295	360	345.000.000	360	346.000.000	360	346.200.000	360	348.000.000	1.735	
				2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	Kegiatan Usaha	13	13	45.363.747	14	46.513.665	15	46.697.579	16	47.277.846	71	
				2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	100,00%	100,00%	6.025.000	100,00%	9.075.000	100,00%	12.125.000	100,00%	15.175.000	100,00%	
				2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah	Jumlah dokumen data perizinan penanaman modal	Dokumen	1	1	6.025.000	1	9.075.000	1	12.125.000	1	15.175.000	5	
				2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	1	6.025.000	1	9.075.000	1	12.125.000	1	15.175.000	5	
		2. Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)								Angka	n/a	81.000		81.500		82.000		82.500		82.500	
			Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (FPB)								Angka	n/a	55.000	1.040.230.610	60.000	1.041.214.417	65.000	1.041.488.000	70.000	1.045.000.000	70.000	4.167.933.027
				2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan	Persen	86,33%	87,00%	1.040.230.610	88,00%	1.041.214.417	89,00%	1.041.488.000	90,00%	1.045.000.000	90,00%	
				2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan dan Nonperizinan sesuai Standar Pelayanan	Persen	99,70%	99,80%	1.155.848.610	99,90%	1.162.214.417	100,00%	1.163.351.168	100,00%	1.170.399.025	100%	
				2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Pelaku Usaha	0	1.550	1.040.230.610	1.600	1.041.214.417	1.700	1.041.488.000	1.900	1.045.000.000	6.750	
				2	18	04	2.01	0007	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan	Kegiatan Usaha	748	775	105.000.000	800	110.000.000	850	110.500.000	950	112.399.025	4.123	
				2	18	04	2.01	0008	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Pelaku Usaha	5	6	10.618.000	8	11.000.000	11	11.363.168	14	13.000.000	44	

NON URUSAN										5.956.529.000			6.005.928.185			5.943.967.933			6.030.206.049			23.936.631.166		
			2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	5.956.529.000	100%	6.005.928.185	100%	5.943.967.933	100%	6.030.206.049	100,00%				
			2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	45.000.000	100%	57.000.000	100%				
			2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	3	20.000.000	13				
			2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5				
			2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5				
			2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5				
			2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5				
			2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5				
			2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	10				
			2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Persen	100%	100%	4.833.717.000	100%	4.863.868.185	100%	4.872.162.933	100%	4.880.551.049	100%				
			2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	37	37	4.666.117.000	37	4.689.447.585	35	4.690.447.585	35	4.691.447.585	181				
			2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	146.100.000	4	152.820.600	4	159.850.348	4	167.203.464	20				
			2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5				
			2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	6500000	1	6.600.000	1	6.865.000	1	6.900.000	5				
			2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10				
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%							
2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5							
2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100%	0%	0	100%	0	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%							
2	18	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		0	0	0	0	0	4	5.000.000	4	5.000.000	8						
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	0%	0	100%	21.950.000	0%	0	100%	17.545.000	100%							
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	1	21.950.000	0	0	1	17.545.000	3							

2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	279.494.000	100%	283.400.000	100%	252.700.000	100%	290.500.000	100%	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4	21.800.000	4	22.000.000	4	22.500.000	4	23.000.000	16	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4	21.070.000	4	22.000.000	4	22.300.000	4	23.500.000	16	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4	22.182.000	4	22.500.000	4	16.000.000	4	17.000.000	16	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2	1.842.000	2	1.900.000	2	1.900.000	2	2.000.000	8	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		20	212.600.000	25	215.000.000	30	190.000.000	35	225.000.000	110	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	22.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	32.000.000	100%	
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	6	15.000.000	8	20000000	14	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	2	22.000.000	2	20.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	18	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	704.318.000	100%	707.601.000	100%	684.605.000	100%	686.610.000	100%	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	2.573.000	1	2.601.000	1	2.605.000	1	2.610.000	4	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	231.745.000	12	233.000.000	12	217.000.000	12	218.000.000	48	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	470.000.000	12	472.000.000	12	465.000.000	12	466.000.000	48	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	52.000.000	100%	54.109.000	100%	54.500.000	100%	56.000.000	100%	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pejsk, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1	40.000.000	1	41.109.000	2	44.000.000	2	45.000.000	6	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10	12.000.000	11	13.000.000	12	10.500.000	13	11.000.000	46	
2	18	01	2.09	000..	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ANGGARAN (Rp)										7.754.855.919		7.858.993.982		7.945.768.870		8.035.969.642		31.595.588.412



Singkawang, 3 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004